



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
Jalan Cengkeh Afo No. 40 Ternate
Telepon : (0921) 3122119, Faksimili : (0921) 3122118
Laman : www.malut.kemenkumham.go.id e-mail : kuper.malut@gmail.com

**LAPORAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PERIODE TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan organisasi yang akuntabel adalah dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran terhadap pelaksanaan anggaran setiap bulannya dalam periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang telah ditentukan dalam periode triwulan I Tahun Anggaran 2022, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan pada periode triwulan berikutnya. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan

untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi anggaran periode triwulan I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah memantau setiap pelaksanaan anggaran oleh pimpinan secara berkala setiap bulannya selama periode triwulan I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

C. Hasil yang Dicapai

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi periode Triwulan I Tahun Anggaran 2022, hasil yang dicapai yaitu:

1. Realisasi Anggaran periode Bulan Januari Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 31 JANUARI 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	121.662.132	10,25%	834.381.000	62.600.000	7,50%	150.000.000	-	0,00%	2.171.796.000	184.262.132	1.987.533.868	8,48%
2	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	162.931.282	9,20%	1.826.908.000	64.230.000	3,52%	150.000.000	-	0,00%	3.747.451.000	227.161.282	3.520.289.718	6,06%
3	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	181.683.908	6,25%	2.579.133.000	64.296.678	2,49%	145.765.000	13.254.548	9,09%	5.632.688.000	259.235.134	5.373.452.866	4,60%
4	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	140.910.803	7,38%	1.360.737.000	5.700.000	0,42%	150.000.000	-	0,00%	3.419.971.000	146.610.803	3.273.360.197	4,29%
5	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	167.834.099	6,36%	1.507.204.000	2.279.280	0,15%	150.000.000	-	0,00%	4.296.919.000	170.113.379	4.126.805.621	3,96%
6	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	70.204.781	10,11%	1.245.000.000	-	0,00%	150.000.000	-	0,00%	2.089.184.000	70.204.781	2.018.979.219	3,36%
7	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	127.581.028	7,24%	2.070.896.000	4.990.000	0,24%	150.000.000	-	0,00%	3.982.205.000	132.571.028	3.849.633.972	3,33%
8	649022 KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN)	7.217.651.000	430.465.397	5,96%	5.917.838.000	13.938.353	0,24%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	444.403.750	12.995.475.250	3,31%
9	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	150.538.728	5,47%	2.661.996.000	26.592.000	1,00%	150.000.000	-	0,00%	5.562.628.000	177.130.728	5.385.497.272	3,18%
10	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	168.329.436	5,59%	2.496.770.000	-	0,00%	150.000.000	-	0,00%	5.660.150.000	168.329.436	5.491.820.564	2,97%
11	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	111.469.181	4,09%	1.533.160.000	13.410.858	0,87%	150.000.000	-	0,00%	4.406.251.000	124.880.039	4.281.370.961	2,83%
12	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	217.615.358	5,83%	4.780.633.000	19.655.700	0,41%	130.000.000	-	0,00%	8.643.231.000	237.271.058	8.405.959.942	2,75%
13	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	58.140.647	5,98%	1.225.857.000	-	0,00%	150.000.000	-	0,00%	2.348.371.000	58.140.647	2.290.230.353	2,48%
14	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	214.035.250	7,57%	5.700.213.000	-	0,00%	1.399.631.000	-	0,00%	9.926.119.000	214.035.250	9.712.083.750	2,16%
15	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	165.583.173	5,73%	1.564.213.000	-	0,00%	5.916.050.000	-	0,00%	10.368.064.000	165.583.173	10.202.480.827	1,60%
16	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	79.095.306	5,58%	3.816.718.000	-	0,00%	148.400.000	-	0,00%	5.383.262.000	79.095.306	5.304.166.694	1,47%
17	649023 KANWIL MALUKU UTARA (AHU)	-	-	-	2.031.284.000	26.412.654	1,30%	-	-	-	2.031.284.000	26.412.654	2.004.871.346	1,30%
18	649025 KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI)	-	-	-	1.462.670.000	9.042.370	0,62%	-	-	-	1.462.670.000	9.042.370	1.453.627.630	0,62%
19	649026 KANWIL MALUKU UTARA (KI)	-	-	-	913.609.000	4.980.000	0,55%	-	-	-	913.609.000	4.980.000	908.629.000	0,55%
20	649029 KANWIL MALUKU UTARA (BPHN)	-	-	-	1.199.068.000	4.980.000	0,42%	-	-	-	1.199.068.000	4.980.000	1.194.088.000	0,42%
21	649030 KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG)	-	-	-	235.670.000	-	0,00%	-	-	-	235.670.000	-	235.670.000	0,00%
22	649024 KANWIL MALUKU UTARA (PAS)	-	-	-	1.027.254.000	-	0,00%	-	-	-	1.027.254.000	-	1.027.254.000	0,00%
23	649028 KANWIL MALUKU UTARA (HAM)	-	-	-	273.061.000	-	0,00%	-	-	-	273.061.000	-	273.061.000	0,00%
24	649027 KANWIL MALUKU UTARA (PP)	-	-	-	247.000.000	-	0,00%	-	-	-	247.000.000	-	247.000.000	0,00%
TOTAL		40.412.276.000	2.568.080.509	6,35%	48.511.273.000	323.107.893	0,67%	9.544.236.000	13.254.548	0,14%	98.467.785.000	2.904.442.950	95.563.342.050	2,95%

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

21 Maret 2022 pukul 15.25 WIT

2. Realisasi Anggaran periode Bulan Februari Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 28 FEBRUARI 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	216.857.894	18,26%	834.381.000	139.315.000	16,70%	150.000.000	-	0,00%	2.171.796.000	356.172.894	1.815.623.106	16,40%
2	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	409.930.874	14,10%	2.579.133.000	282.396.165	10,95%	145.765.000	145.485.936	99,81%	5.632.688.000	837.812.975	4.794.875.025	14,87%
3	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	385.674.960	14,61%	1.507.204.000	132.475.170	8,79%	150.000.000	42.000.000	28,00%	4.296.919.000	560.150.130	3.736.768.870	13,04%
4	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	318.132.364	17,97%	1.826.908.000	167.421.981	9,16%	150.000.000	-	0,00%	3.747.451.000	485.554.345	3.261.896.655	12,96%
5	649026 KANWIL MALUKU UTARA (KI)	-	-	-	913.609.000	118.218.000	12,94%	-	-	-	913.609.000	118.218.000	795.391.000	12,94%
6	649027 KANWIL MALUKU UTARA (PP)	-	-	-	247.000.000	30.659.000	12,41%	-	-	-	247.000.000	30.659.000	216.341.000	12,41%
7	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	311.281.214	16,30%	1.360.737.000	80.519.000	5,92%	150.000.000	-	0,00%	3.419.971.000	391.800.214	3.028.170.786	11,46%
8	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	250.132.806	9,19%	1.533.160.000	155.625.230	10,15%	150.000.000	72.859.000	48,57%	4.406.251.000	478.617.036	3.927.633.964	10,86%
9	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	128.791.705	18,55%	1.245.000.000	68.300.000	5,49%	150.000.000	29.834.881	19,89%	2.089.184.000	226.926.586	1.862.257.414	10,86%
10	649028 KANWIL MALUKU UTARA (HAM)	-	-	-	273.061.000	29.590.000	10,84%	-	-	-	273.061.000	29.590.000	243.471.000	10,84%
11	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	196.638.903	13,87%	3.816.718.000	354.156.573	9,28%	148.400.000	-	0,00%	5.383.262.000	550.795.476	4.832.466.524	10,23%
12	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	365.075.394	13,27%	2.661.996.000	196.907.649	7,40%	150.000.000	-	0,00%	5.562.628.000	561.983.043	5.000.644.957	10,10%
13	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	430.231.035	15,22%	5.700.213.000	570.784.699	10,01%	1.399.631.000	-	0,00%	9.926.119.000	1.001.015.734	8.925.103.266	10,08%
14	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	517.336.438	13,86%	4.780.633.000	327.060.708	6,84%	130.000.000	11.000.000	8,46%	8.643.231.000	855.397.146	7.787.833.854	9,90%
15	649030 KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG)	-	-	-	235.670.000	22.189.000	9,42%	-	-	-	235.670.000	22.189.000	213.481.000	9,42%
16	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	367.853.606	12,21%	2.496.770.000	150.179.295	6,01%	150.000.000	-	0,00%	5.660.150.000	518.032.901	5.142.117.099	9,15%
17	649022 KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN)	7.217.651.000	941.534.513	13,04%	5.917.838.000	262.267.199	4,43%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	1.203.801.712	12.236.077.288	8,96%
18	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	254.702.045	14,46%	2.070.896.000	101.702.545	4,91%	150.000.000	-	0,00%	3.982.205.000	356.404.590	3.625.800.410	8,95%
19	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	153.627.948	15,80%	1.225.857.000	10.000.000	0,82%	150.000.000	-	0,00%	2.348.371.000	163.627.948	2.184.743.052	6,97%
20	649024 KANWIL MALUKU UTARA (PAS)	-	-	-	1.027.254.000	66.791.600	6,50%	-	-	-	1.027.254.000	66.791.600	960.462.400	6,50%
21	649029 KANWIL MALUKU UTARA (BPHN)	-	-	-	1.199.068.000	65.261.000	5,44%	-	-	-	1.199.068.000	65.261.000	1.133.807.000	5,44%
22	649025 KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI)	-	-	-	1.462.670.000	77.066.170	5,27%	-	-	-	1.462.670.000	77.066.170	1.385.603.830	5,27%
23	649023 KANWIL MALUKU UTARA (AHU)	-	-	-	2.031.284.000	99.032.654	4,88%	-	-	-	2.031.284.000	99.032.654	1.932.251.346	4,88%
24	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	379.967.346	13,16%	1.564.213.000	64.038.370	4,09%	5.916.050.000	2.200.000	0,04%	10.368.064.000	446.205.716	9.921.858.284	4,30%
TOTAL		40.412.276.000	5.627.769.045	13,93%	48.511.273.000	3.571.957.008	7,36%	9.544.236.000	303.379.817	3,18%	98.467.785.000	9.503.105.870	88.964.679.130	9,65%

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

21 Maret 2022 pukul 15.26 WIT

3. Realisasi Anggaran periode Bulan Maret Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 31 MARET 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	649028 KANWIL MALUKU UTARA (HAM)	-	-	-	273.061.000	75.210.000	27,54%	-	-	-	273.061.000	75.210.000	197.851.000	27,54%
2	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	320.339.143	26,98%	834.381.000	252.425.000	30,25%	150.000.000	-	0,00%	2.171.796.000	572.764.143	1.599.031.857	26,37%
3	649030 KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG)	-	-	-	235.670.000	61.463.450	26,08%	-	-	-	235.670.000	61.463.450	174.206.550	26,08%
4	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	472.505.846	26,69%	1.826.908.000	314.720.256	17,23%	150.000.000	149.796.044	99,86%	3.747.451.000	937.022.146	2.810.428.854	25,00%
5	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	594.403.291	22,52%	1.507.204.000	314.713.438	20,88%	150.000.000	149.800.000	99,87%	4.296.919.000	1.058.916.729	3.238.002.271	24,64%
6	649026 KANWIL MALUKU UTARA (KI)	-	-	-	913.609.000	222.217.600	24,32%	-	-	-	913.609.000	222.217.600	691.391.400	24,32%
7	649027 KANWIL MALUKU UTARA (PP)	-	-	-	247.000.000	58.678.000	23,76%	-	-	-	247.000.000	58.678.000	188.322.000	23,76%
8	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	186.352.629	26,84%	1.245.000.000	160.172.000	12,87%	150.000.000	149.734.881	99,82%	2.089.184.000	496.259.510	1.592.924.490	23,75%
9	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	305.052.524	21,51%	3.816.718.000	799.327.861	20,94%	148.400.000	116.595.000	78,57%	5.383.262.000	1.220.975.385	4.162.286.615	22,68%
10	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	631.738.630	21,73%	2.579.133.000	478.411.897	18,55%	145.765.000	145.485.936	99,81%	5.632.688.000	1.255.636.463	4.377.051.537	22,29%
11	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	478.304.328	25,05%	1.360.737.000	252.797.100	18,58%	150.000.000	-	0,00%	3.419.971.000	731.101.428	2.688.869.572	21,38%
12	649024 KANWIL MALUKU UTARA (PAS)	-	-	-	1.027.254.000	218.225.900	21,24%	-	-	-	1.027.254.000	218.225.900	809.028.100	21,24%
13	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	778.698.484	20,86%	4.780.633.000	801.680.858	16,77%	130.000.000	129.339.016	99,49%	8.643.231.000	1.709.718.358	6.933.512.642	19,78%
14	649029 KANWIL MALUKU UTARA (BPHN)	-	-	-	1.199.068.000	236.548.500	19,73%	-	-	-	1.199.068.000	236.548.500	962.519.500	19,73%
15	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	383.739.438	14,09%	1.533.160.000	334.330.818	21,81%	150.000.000	149.859.000	99,91%	4.406.251.000	867.929.256	3.538.321.744	19,70%
16	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	567.371.733	20,63%	2.661.996.000	368.031.881	13,83%	150.000.000	148.973.612	99,32%	5.562.628.000	1.084.377.226	4.478.250.774	19,49%
17	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	594.948.063	19,74%	2.496.770.000	415.664.758	16,65%	150.000.000	48.766.000	32,51%	5.660.150.000	1.059.378.821	4.600.771.179	18,72%
18	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	215.953.324	22,21%	1.225.857.000	168.175.349	13,72%	150.000.000	48.030.000	32,02%	2.348.371.000	432.158.673	1.916.212.327	18,40%
19	649025 KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI)	-	-	-	1.462.670.000	260.248.884	17,79%	-	-	-	1.462.670.000	260.248.884	1.202.421.116	17,79%
20	649022 KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN)	7.217.651.000	1.430.409.318	19,82%	5.917.838.000	953.306.089	16,11%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	2.383.715.407	11.056.163.593	17,74%
21	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	638.509.750	22,59%	5.700.213.000	1.101.972.156	19,33%	1.399.631.000	-	0,00%	9.926.119.000	1.740.481.906	8.185.637.094	17,53%
22	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	367.358.697	20,86%	2.070.896.000	265.941.651	12,84%	150.000.000	38.000.600	25,33%	3.982.205.000	671.300.948	3.310.904.052	16,86%
23	649023 KANWIL MALUKU UTARA (AHU)	-	-	-	2.031.284.000	302.080.454	14,87%	-	-	-	2.031.284.000	302.080.454	1.729.203.546	14,87%
24	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	587.140.033	20,33%	1.564.213.000	286.838.831	18,34%	5.916.050.000	2.200.000	0,04%	10.368.064.000	876.178.864	9.491.885.136	8,45%
TOTAL		40.412.276.000	8.552.825.231	21,16%	48.511.273.000	8.703.182.731	17,94%	9.544.236.000	1.276.580.089	13,38%	98.467.785.000	18.532.588.051	79.935.196.949	18,82%

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

1 April 2022 pukul 09.16 WIT

4. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode Triwulan I, yaitu:

- Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara senilai Rp18.532.588.052 dari total PAGU Anggaran Rp79.935.196.949, dengan persentase 18,82%.
- Realisasi anggaran untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara senilai Rp3.818.388.195 dari total PAGU Anggaran Rp17.011.106.805, dengan persentase 16,66%.
- Sesuai dengan Petunjuk Arahan dari Sekretaris Jenderal terkait Hasil Pelaksanaan Anggaran periode Triwulan I Kementerian Hukum dan HAM RI, target realisasi anggaran sebesar 15%. Target realisasi per jenis belanja, yaitu belanja pegawai sebesar 20%, belanja barang sebesar 15%, dan belanja modal sebesar 10%.
- Secara agregat, target realisasi per satuan kerja ditentukan sesuai dengan nilai PAGU Anggaran per jenis belanja.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per tanggal 31 Maret 2022, terdapat tiga satuan kerja yang belum mencapai batas minimum agregat target realisasi anggaran yaitu, Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha (407503) dengan persentase 16,86%, Satuan Kerja Direktorat Jenderal AHU (649023) dengan persentase 14,87% dan Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate (418350) dengan persentase 8,45%.
- Satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha memiliki PAGU belanja pegawai sebesar Rp1.761.309.000, PAGU belanja barang sebesar Rp2.070.896.000, dan PAGU belanja modal sebesar Rp150.000.000, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp671.300.948 (16,86%). Berdasarkan persentase target realisasi per jenis belanja yang telah ditentukan, secara agregat target realisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha sebesar Rp677.896.200 (17,02%).
- Satuan kerja Direktorat Jenderal AHU memiliki PAGU belanja barang sebesar Rp2.031.284.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp302.080.454 (14,87%). Dikarenakan target belanja barang periode triwulan I sebesar 15%, satuan kerja Direktorat Jenderal AHU belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar Rp304.692.600.
- Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate memiliki PAGU belanja pegawai sebesar Rp2.887.801.000, PAGU belanja barang sebesar Rp1.546.213.000, dan PAGU belanja modal sebesar Rp5.916.050.000, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp876.178.864 (8,45%). Secara agregat, total target realisasi anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate sebesar Rp1.403.797.150 (13,54%).

5. Faktor yang menyebabkan terjadinya kendala yang dihadapi:

- Realisasi belanja barang pada Lembaga Masyarakat Kelas III Labuha belum mencapai batas minimum target penyerapan sebesar 12,84%. Sementara realisasi belanja pegawai dan belanja modal telah mencapai batas minimum target penyerapan. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran pada Lembaga Masyarakat Kelas III Labuha belum mencapai target realisasi secara agregat. Diharapkan pada periode Triwulan II, Lembaga Masyarakat Kelas III Labuha mampu memaksimalkan penyerapan anggaran pada setiap jenis belanja, khususnya belanja barang.
- Realisasi belanja barang pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal AHU belum mencapai batas minimum target penyerapan sebesar 14,87%. Dikarenakan selisih target dan realisasi yang terbilang kecil, hanya 0,13%, maka diharapkan satuan kerja Direktorat Jenderal AHU dapat memaksimalkan penyerapan anggaran pada periode Triwulan II
- Realisasi belanja modal pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate memiliki *gap* yang cukup besar terhadap target yang ditentukan. PAGU belanja modal pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate sebesar Rp5.916.050.000, sementara realisasinya hanya 0,04% atau sebesar Rp2.200.000. Belanja modal ini terkait dengan penyelesaian pembangunan gedung/bangunan pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Ternate. Apabila proses pelaksanaan pembangunan gedung/bangunan telah dimulai, diharapkan penyerapan anggaran pada Lembaga Masyarakat Kelas III Ternate dapat mencapai target yang ditentukan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan langkah perbaikan berupa rencana tindak lanjut, yaitu:

- a. Setiap satuan kerja harus memerhatikan penyerapan anggaran per jenis belanja dan mendukung belanja berkualitas melalui peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun.
- b. Satuan kerja diharapkan melakukan penyusunan rencana kegiatan periode Triwulan II kemudian melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA.
- c. Sesuai dengan PER-5/PB/2022, batas waktu pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode Triwulan I dan II tahun 2022 adalah tanggal 14 April 2022.
- d. RPD Halaman III DIPA bulan Januari-Maret sesuai dengan realisasi anggaran per jenis belanja. RPD Halaman III DIPA bulan April-Juni sesuai rencana belanja per jenis belanja, dengan memerhatikan target realisasi anggaran triwulan II, yaitu: Belanja Pegawai sebesar 50%, Belanja Barang sebesar 50%, dan Belanja Modal sebesar 40%.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka perlu segera dilaksanakan tindak lanjut pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

E. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran periode Triwulan I Tahun Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan diharapkan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian untuk maklum.



Dibuat di Ternate
pada tanggal 14 Maret 2022
Kepala Divisi Administrasi

Andi Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002